

Analisis Konflik Ekologi Politik dalam Pembangunan Waduk Jatigede

Luh Putu Sunetri Dewi¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, A.A Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : sunetridewi@gmail.com¹⁾, piersandreasnoak@unud.ac.id²⁾, mahaswari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study tries to analyze the political ecological conflicts that arise as a result of the construction of the Jatigede Reservoir in the Sumedang Regency area. To analyze the ecological conflicts that occurred in the construction of the Jatigede Reservoir, researchers used political ecology theory and used research method literature studies, where data was obtained through library sources such as documents and previous research related to the topics and problems studied. The results of this study indicate that there was political ecological conflict in the Jatigede Reservoir development when there was resistance from the community who demanded proper relocation and compensation as compensation for the loss of their homes and fields as their livelihood. In this case it can be seen that the government is trying to carry out economic development to improve people's welfare, but on the other hand it is sacrificing the environment and other communities. The process of constructing this dam has created conflict between the affected communities and the government. Apart from having to lose their homes and places to earn a living, they also lost their ancestral heritage which has become cultural heritage and most of them are the ancestral graves of the Sumedang people and environmental changes have had an impact on the economic decline of the affected people.

Key Word : Reservoir, Political Ecology, Politized Environment

1. PENDAHULUAN

Pembangunan waduk merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. Namun, seringkali pembangunan mega proyek seperti waduk harus mengorbankan sekelompok masyarakat bahkan mengorbankan alam. Salah satu proyek pembangunan waduk yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia adalah pembangunan Waduk Jatigede yang digagas pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno dan direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Waduk Jatigede terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat yang dibangun untuk menampung hingga 979,5 juta meter kubik air dengan membendung aliran Sungai Cimanuk

yang berada di wilayah Kecamatan Jatigede, Sumedang.

Pembangunan Waduk Jatigede oleh pemerintah bertujuan agar Waduk Jatigede dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), sarana irigasi dan pengendali banjir serta sebagai pusat pengairan. Waduk Jatigede direncanakan menjadi sumber energi untuk PLTA berdaya 110 Megawatt (MW) dan diperkirakan dapat menyediakan air bersih bagi warga dengan daya tampung mencapai 3.500 meter kubik per detik dan diharapkan mampu mencegah 14.000 hektar kawasan di Jawa Barat tergenang banjir saat musim penghujan serta untuk mengairi lahan pertanian produktif di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka seluas 90.000 hektar.

Meskipun pembangunan waduk dicanangkan untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar, dalam proses pembangunannya banyak hal yang dikorbankan demi terwujudnya waduk ini. Pembangunan Waduk Jatigede menghabiskan lahan seluas 4.946 Ha yang mengakibatkan ditenggelamkannya 28 desa di empat kecamatan. Waduk Jatigede menjadi waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur karena luasnya wilayah yang digunakan. Keempat kecamatan yang ditenggelamkan antara lain Kecamatan Jatigede, Kecamatan Wado, Kecamatan Darmaraja serta Kecamatan Jatinunggal.

Ditenggelamkannya puluhan desa membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka serta hilangnya ekosistem yang berada di kawasan tersebut kemudian melahirkan konflik antara masyarakat terdampak dengan pemerintah. Konflik yang muncul bukan hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan sosial budaya namun juga aspek ekologi. Penelitian ini berusaha menganalisa konflik ekologi politik yang terjadi dalam pembangunan Waduk Jatigede.

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Vandana Shiva seorang aktivis lingkungan India yang juga seorang feminis menganggap bahwa pembangunan megaprojek waduk merupakan salah satu hal yang dapat merusak alam. Dalam wawancaranya inmotionmagazine.com mengatakan bahwa Narmada DAM yang didanai oleh Bank Dunia merupakan pembangunan yang sangat besar, ia tidak menyalahkan pembangunan DAM yang airnya bisa digunakan oleh masyarakat banyak namun masalahnya ketika DAM yang dibangun sangat besar seperti Narmada DAM maka hal yang terjadi adalah siklus air yang terganggu, namun Bank Dunia mendanai pembangunan ini untuk irigasi di distrik yang sama sayangnya dalam beberapa tahun akan terjadi *waterlogging* yang menyebabkan lahan terganggu. "*Water rights as a natural rights do not originate with the state: they evolve out of given*

ecological context of human existence". (Shiva, 2001).

Dalam mengkaji konflik yang terjadi dalam pembangunan Waduk Jatiluhur, peneliti menggunakan teori ekologi politik sebagai pisau analisis. Ekologi politik pertama kali dicetuskan oleh Russett pada tahun 1967 disusul oleh Cockburn dan Ridgeway (1970), Eric Wolf (1972) dan Miller (1978) namun konsep ekologi politik mulai berkembang pada akhir tahun 1970an dan awal tahun 1980an. Ekologi politik sendiri merupakan bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik dalam pengelolaan lingkungan. Ekologi politik memiliki asumsi pokok bahwa perubahan lingkungan tidak bersifat netral melainkan sebuah bentuk *politized environment* dimana melibatkan aktor - aktor yang memiliki kepentingan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional (Bryant, 2001). Tujuan dari ekologi politik tidak hanya sebatas menjelaskan fenomena perubahan lingkungan, namun juga menjadi pijakan penting dalam formulasi kebijakan lingkungan.

Menurut Arif Satria dalam bukunya yang mengutip Bryant dan Bailey tahun 2001 menyatakan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan waduk ini adalah permasalahan politik lingkungan yang umumnya dijabarkan melalui paradigma teknosentris karena politik lingkungan lebih fokus pada penelitian dampak isu lingkungan yang berpengaruh dengan proses politik formal serta peran negara dalam pengelolaan lingkungan.

Menurut Robbins (2004) yang dikutip dari buku Arif Satria dalam Fondasi, Teori Dan Diskursus Ekologi Manusia menyebutkan ada empat tesis tentang pendekatan ekologi politik antara lain degradasi dan marginalisasi yaitu ketika adanya isu perubahan lingkungan yang terjadi karena eksploitasi berlebihan yang kemudian menyebabkan kemiskinan, tesis kedua yaitu konflik lingkungan ketika adanya kelangkaan sumberdaya akibat pemanfaatan oleh negara, swasta maupun elit sosial yang kemudian menimbulkan konflik antar kelompok (gender, kelas, maupun etnik). Konservasi dan kontrol yaitu konflik yang bersumber dari masalah konservasi yang disebabkan oleh tergesernya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya serta diabaikannya mata pencaharian dan organisasi sosial ekonomi mereka hanya karena demi konservasi. Terakhir adalah identitas lingkungan dan gerakan sosial ketika perjuangan sosial politik biasanya terkait dengan upaya mempertahankan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi pustaka. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan atas karya tertulis, baik hasil penelitian yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Embun, 2012). Penelitian ini

menggubakan metode studi literatur, dimana tidak mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan dan bertemu secara langsung dengan responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan, namun dapat diperoleh dengan mempelajari dokumen dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Zed, 2014), pada *library research* (riset pustaka), penelusuran pustaka tidak hanya untuk menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) sebagai langkah awal penelitian, namun sekaligus menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Persiapan yang dilakukan untuk penelitian studi literatur sama dengan penelitian lainnya akan tetapi metode pengumpulan data dan sumber data penelitian ini didapat dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang berupa sumber-sumber tertulis seperti karya ilmiah dan dokumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

SEJARAH PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

Mega proyek Pemerintah Indonesia yang digagas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno salah satunya adalah Pembangunan Waduk Jatigede. Proyek ini dimulai dengan dirancangnya rencana pembangunan (*master plan*) pada tahun 1963 di era pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yaitu

pada tahun 1982 dilakukan realisasi pembebasan lahan. kemudian desain pembangunan waduk dilakukann pada tahun 1988. Pada tahun 1982 hingga 1986 dilakukan proses pembayaran ganti rugi pertama, tahun 1994 hingga 1997 pembayaran ganti rugi tahap kedua serta tahun 2005 hingga 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi ketiga dan Pada tahun 2007 dilakukan proses konstruksi.

Pembangunan waduk ini berjalan lamban karena terkendala masalah sosial khususnya relokasi warga yang terdampak. Dalam rentan waktu 2000 hingga 2014 masyarakat melakukan perlawanan dan penolakan masyarakat mulai muncul menuntut relokasi dan kompensasi yang layak untuk warga terdampak. Hingga pada akhirnya Waduk Jatigede diresmikan pada tahun 2015 oleh menteri PUPR.

Proses pembangunan Waduk Jatigede cukup panjang mengingat waktu yang dibutuhkan hingga waduk ini di resmikan mencapai 52 tahun, dimulai dengan dikeluarkannya rencana pembangunan, dilakukannya pembebasan lahan untuk wilayah yang akan ditenggelamkan, pembuatan desain konstruksi dan pembangunan fisik bendungan. Namun, meskipun bendungan ini sudah diresmikan dan berfungsi mulai tahun 2017 penduduk yang desanya terdampak masih memperjuangkan hak-hak yang belum mereka terima dari pemerintah.

PENDEKATAN AKTOR

Bryant dan Bailey dalam buku *The Third World Political Ecology* (2001) menggunakan pendekatan aktor dalam mengkaji ekologi politik. Pendekatan ini berpusat pada pelaku (*Actor Oriented*) dan berlandaskan konsep *politized environment* yang memiliki asumsi bahwa untuk memahami permasalahan lingkungan, penting untuk memahami secara bersamaan konteks politik dan ekonomi dimana masalah itu muncul (Satria, 2007). Bryant dan Bailey (2001) menaruh perhatian pada lima aktor yang muncul dalam ekologi politik yaitu negara, pengusaha, lembaga multilateral, Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktor akar rumput (*grass root*) (Satria, 2007). Dalam ekologi politik, suatu negara memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai aktor pengguna maupun aktor pelindung sumber daya alam. Akibat dari dua peran ini suatu negara kerap menghadapi konflik kepentingan. Sementara itu, pihak yang paling lemah dalam *politized environment* adalah aktor akar rumput (*grass root*) karena rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan yang ditimbulkan dari adanya sebuah politisasi lingkungan dan karena hampir selalu mengalami marginalisasi. Lemahnya aktor akar rumput dalam politisasi lingkungan terjadi karena aktor lain seperti negara dan pengusaha memiliki kekuatan politik yang lebih besar dalam mengendalikan

pemanfaatan sumber daya alam (Satria, 2007).

Proyek pembangunan Waduk Jatigede merupakan mega proyek yang dirancang oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak heran jika *stakeholder* pemerintah menjadi aktor yang sangat berperan dalam kasus ini, aktor tersebut diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri (Permendagri), Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Aktor-aktor tersebut harus dikelompokkan berdasarkan era pemerintahannya berdasarkan waktu pelaksanaan. Hal ini perlu dilakukan mengingat panjangnya proses pembangunan waduk ini serta melibatkan beberapa aktor pemerintahan. Secara detail aktor tersebut bersal dari pemerintahan era Soekarno yang merancang ide pembangunan waduk, kemudian era pemerintahan Soeharto yang melakukan eksekusi berupa pembebasan lahan penduduk, dan kemudian dilanjutkan pemerintahan SBY yang mendapat pendanaan dari China, dan yang terakhir dieksekusi oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan misi kampanyenya yang menargetkan ketahanan pangan Indonesia sehingga waduk sangat perlu untuk sistem irigasi.

Aktor lain yang ikut ambil andil dalam mega proyek ini adalah pemerintahan China melalui PT SinoHydro yang memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar Rp. 2,04 T. Dilansir dari Rappler.com kerjasama ini

juga melibatkan kontraktor Indonesia dengan beberapa tenaga kerja asing dari China. Selain Pemerintah Indonesia serta China, aktor yang juga terlibat dalam konflik ini adalah masyarakat dan LSM. Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Bryant dan Bailey sesuai dengan realitas yang ada dimana masyarakat atau kelompok *grass root* menjadi salah satu pihak yang dirugikan dari adanya pembangunan ini karena mereka harus kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan bahkan hak-hak mereka atas ganti rugi belum terpenuhi, sehingga membuat masyarakat mulai tahun 2000an mulai melakukan perlawanan dengan audiensi hingga demonstrasi dan didampingi oleh LSM seperti LBH Bandung.

Jika dilihat dari proses awal rencana pembangunan waduk diawali dengan adanya studi pengembangan wilayah di Sungai Cimanuk hingga Cisanggarung oleh konsultan Coyne et Bellier dari Prancis pada tahun 1963. Untuk mendukung pembangunan wilayahnya mereka merekomendasikan pembangunan Waduk serbaguna. Dimana dari adanya studi pembangunan waduk tersebut, pemerintah saat itu yaitu pada masa Presiden Soekarno menyimpulkan bahwa pembangunan waduk dibutuhkan demi mendukung kemajuan bangsa dan negara,

Dari data tersebut ada dugaan bahwa pihak yang diuntungkan adalah para pemodal karena menurut laporan *International Rivers* yang dikeluarkan pada tahun 2012 sejumlah perusahaan

dan lembaga keuangan China terlibat dalam proyek pembangunan 308 bendungan dan 70 waduk di dunia. Tentu saja pendanaan yang diberikan tidak semata-mata sebagai belas kasihan, karena hal tersebut sifatnya kerjasama pasti saja telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Untuk itu, yang banyak dirugikan dalam pembangunan Waduk Jatigede ini adalah masyarakat di 28 desa terdampak yang rumah dan ladang atau sawahnya ditenggelamkan karena mereka kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya namun tidak mendapat kompensasi yang layak karena dana ganti rugi yang diberikan sangat kecil sehingga tidak mencukupi untuk membeli tanah, membuat rumah dan terbatas dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari ditambah lagi masyarakat terdampak sulit memperoleh pekerjaan karena sumber matapencaharian mereka telah tenggelam bersama desanya.

Negara adalah aktor yang diharapkan dapat menyediakan fasilitas publik mulai dari infrastruktur sosial dan fisik hingga keamanan bagi masyarakat. namun tanpa sistem kapitalis hal ini akan sulit terwujud. Selain itu aktivitas industri negara banyak mengalokasikan sumber daya untuk diekspor ke negara maju. Proses ini yang seringkali menimbulkan marjinalisasi masyarakat yang dulu memiliki akses terhadap sumber daya tersebut.

KONFLIK SOSIAL EKONOMI

Pembangunan waduk memiliki berbagai manfaat, diantaranya dapat menjadi kawasan penampungan air saat musim penghujan, sebagai sistem pengirigasian untuk lahan – lahan pertanian dan perkebunan serta menjadi sistem pembangkit listrik. Dengan berbagai manfaat itulah yang membuat pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang. Namun, pembangunan yang telah direncanakan pada era pemerintahan Presiden Soekarno ini ternyata menimbulkan konflik yang cukup panjang.

Konflik pembangunan Waduk Jatigede ini terjadi antara masyarakat terdampak dengan pemerintah. Konflik ini tentu sangat kompleks mengingat jangka waktu rencana awal dan eksekusinya memakan waktu hingga puluhan tahun, hal ini menyebabkan hak masyarakat tidak terpenuhi secara maksimal. Hak tersebut meliputi pembebasan lahan, relokasi penduduk, serta uang ganti rugi yang harus mereka terima karena desanya akan dialiri air dari waduk ini. Sesuai dengan Perpres No.1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, didalamnya disebutkan jika setiap Kepala Keluarga (KK) yang tanah dan tempat tinggalnya terdampak pembangunan waduk dijanjikan mendapat kompensasi Rp 119 Juta serta uang santunan sebesar Rp. 29 Juta. Namun pada kenyataannya,

hingga Waduk siap untuk digenangi pembayaran ganti rugi maupun tunjangan belum sepenuhnya tuntas.

Konflik pembangunan waduk bukan hanya mengenai permasalahan sosial, melainkan juga berdampak ekonomi masyarakat. Karena wilayah yang digunakan sebagai waduk merupakan wilayah subur dengan potensi pertanian dan perkebunan yang produktif. Permasalahan lain yang muncul adalah kawasan yang akan digenangi untuk pembangunan Waduk Jati Gede terdapat 33 situs cagar budaya dimana situs tersebut kebanyakan adalah makam keramat leluhur warga Sumedang.

Pembangunan Waduk Jatigede menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan, dari beberapa sumber dinyatakan bahwa pembangunan mega proyek ini menyebabkan timbulnya konflik diantara masyarakat terdampak dengan pemerintah. Pembangunan Waduk Jatigede ini tentu melibatkan alam sebagai objeknya, dari sisi ekologis pembangunan mega proyek ini tentu akan menenggelamkan habitat alam yang ada disekitar waduk ini. Selain itu waduk Jatigede berada di daerah rawan gempa karena wilayah tersebut berada pada titik patahan aktif Baribis yang menyebabkan rawan gempa. Air yang mengegenang dalam jumlah besar tersebut dapat masuk kedalam patahan, kemudian menghidupkan kembali patahan, yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya gempa. Selain

dari sisi ekologis, pembangunan waduk juga berdampak pada sisi sosial masyarakat.

Dalam kasus ini, proses pembebasan lahan memicu terjadinya konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal antara pemerintah sebagai pelaksana pembangunan waduk dengan masyarakat yang terdampak. Hal ini terjadi karena masyarakat merasakan adanya ketidakpuasan serta ketidakadilan atas sikap pemerintah terhadap nasib mereka, karena lebih banyak dampak negatif yang diterima dari adanya pembangunan Waduk Jatigede, sehingga hal tersebut mendorong masyarakat terdampak melakukan aksi perlawanan.

Selain konflik vertikal dalam kasus ini terjadi pula konflik horizontal antara sesama masyarakat terdampak, yang dipicu oleh adanya kecemburuan sosial antar masyarakat, karena adanya perbedaan besar nominal ganti rugi yang diterima. Namun syukurnya konflik yang terjadi masih berada dalam batas kewajaran karena aksi yang muncul tidak sampai menyebabkan bentrokan fisik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik terus menguat disebabkan oleh masyarakat yang kehilangan lahan tempat tinggalnya, kehilangan lahan bertani, mereka juga terdampak akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan ini yang lebih parah pembebasan lahan yang direncanakan pemerintah belum berjalan dengan

sempurna, kompensasi ganti rugi yang diberikan negara untuk masyarakat dinilai masih rendah, relokasi warga yang masih belum dilakukan secara keseluruhan, serta relokasi situs atau cagar budaya yang ada disekitar tempat pembangunan waduk tersebut.

Sebelumnya kawasan desa yang menjadi cikal bakal waduk Jatigede merupakan wilayah yang subur dan menjadi daerah penghasil padi yang melimpah tidak heran jika warganya hidup dengan baik dari hasil pertanian, namun setelah waduk dibangun masyarakat mengalami penurunan baik dalam pendapatan maupun hasil pertanian. Menurut data BPS tahun 2011 dan 2016 yang dipaparkan oleh Mustika dan Asyiwati, dalam penelitiannya mengenai Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Pendapatan Masyarakat Dari Produksi Padi menunjukkan jika produksi padi mengalami penurunan sebesar 56,29% sedangkan pendapatan masyarakat mengalami penurunan sebesar 16,67% sehingga dapat dikatakan jika pembangunan Waduk Jatigede belum memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kerugian-kerugian yang dirasakan masyarakat ditambah lamanya proses pembangunan serta pembebasan lahan membuat masyarakat menjadi kaum yang termarjinalisasi. Keadilan yang seharusnya mereka dapat justru harus melalui berbagai hambatan dan dampak buruk dari pembangunan besar ini.

PERLAWANAN MASYARAKAT TERDAMPAK

Konflik dalam pembangunan Waduk Jatigede terus berkembang dengan adanya perlawanan dan penolakan dari pihak masyarakat dan LSM yang mendampingi masyarakat terdampak, masyarakat juga melakukan beberapa perlawanan diantaranya berupa aksi demonstrasi. Aksi perlawanan yang dilakukan masyarakat terdampak cukup beragam diantaranya dengan mengajukan surat pernyataan protes dan petisi kepada pemerintah pusat, melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi ke sejumlah kantor pemerintah pusat, dan ada pula masyarakat yang memilih tetap bertahan tinggal di permukiman yang menjadi lokasi genangan bendungan. Sikap perlawanan yang diambil oleh masyarakat menunjukkan bahwa mereka mengharapkan keadilan yang lebih bermutu bawasannya perampasan hak hidup mereka adalah ketidakadilan yang belum bisa dikompensasi oleh negara dan bentuk kekecewaan mereka karena merasa pemerintah tidak peduli terhadap nasib mereka.

PENYELESAIAN KONFLIK

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menyelesaikan konflik (*accountability*) dan untuk membuktikan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi, maka pemerintah membentuk SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan

Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan konflik yang timbul di wilayah pembangunan sebagai pihak yang memprakarsai pembangunan ini dan bertanggungjawab atas nasib masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupannya.

SAMSAT menjalankan tugasnya dengan memberikan merespon terhadap protes yang diajukan masyarakat Jatigede terkait masalah ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan dengan melakukan pendataan ulang terhadap tanah-tanah yang terlewat dan belum dibebaskan. Data - data tersebut kemudian disesuaikan dan dilakukan pengecekan dengan data yang dimiliki oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T). Tempat relokasi penduduk terdampak disediakan berdasarkan keinginan masyarakat. Untuk masyarakat yang terbentur dengan hukum yang diberlakukan tahun 1980an dan tidak bisa direlokasi telah dilakukan ganti rugi berupa uang rohim yang mana ide ini juga dibuat karena aspirasi dari masyarakat.

Pada tahun 1982-1986 pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah diwarnai dengan aksi kekerasan dan tindakan pemaksaan melalui intimidasi terhadap masyarakat, hal tersebut menjadi faktor timbulnya permasalahan yang berlarut- larut dan juga mengakibatkan munculnya konflik yang semakin rumit dan memanas.

Sehingga untuk selanjutnya SAMSAT tidak melakukan tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan agar hal yang sama tidak terulang kembali.

Sejauh ini SAMSAT memang menjadi solusi alternatif bagi warga terdampak, namun meskipun demikian masih banyak masyarakat yang merasa hak-haknya belum terpenuhi hingga tahun 2018 beberapa warga kembali menyurati presiden terkait uang ganti rugi yang belum diberikan kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN

Pembangunan Waduk merupakan sebuah mega proyek yang memerlukan wilayah yang sangat luas serta merubah sebuah ekosistem dari sebuah daratan menjadi perairan. Berubahnya sebuah ekosistem tentu saja mempengaruhi makhluk hidup yang semula mendiami kawasan tersebut terutama manusia. Perubahan ekosistem tidak hanya tentang masalah lingkungan namun juga berkaitan dengan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari memanfaatkan hasil alam di wilayah tersebut. Pembangunan Waduk Jatigede termasuk ekologi politik karena pembangunan ini sesuai dengan asumsi pokok ekologi politik dimana perubahan lingkungan tidak bersifat netral melainkan sebuah bentuk *politized environment* adanya keterlibatan aktor - aktor yang memiliki kepentingan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional (Bryant,2001). Pembangunan waduk ini mengakibatkan terjadinya perubahan

lingkungan akibat ditenggelamkannya daratan berpenghuni untuk dijadikan kawasan penampungan air, untuk merealisasi program pemerintah demi kepentingan masyarakat namun mengorbankan lingkungan dan masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, M. & Malihah, E. 2016. *KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN JATIGEDE DI DESA WADO*. *Sosietas* Vol. 6 No. 2
Doi:
<https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4248> diakses pada tanggal 6 November 2022
- Arofah, Nazsir, dan Hanapiah. 2015. *Strategi Pemecahan masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede*.
<http://journal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/11840/5515>.
diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
- Detikfinance. 2014. *Digagas Sejak Era Bung Karno, Ini Sejarah Waduk Jatigede*
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2688359/digagas-sejak-era-bung-karno-ini-sejarah-waduk-jatigede>
diakses pada tanggal 5 November 2022
- Firdaus, F. 2015. *5 Kontroversi waduk Jatigede*.

- <https://www.rappler.com/indonesia/105121-kontroversi-waduk-jatigede-tenggelam>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.
- Fransisco dan Mahida. 2015. *Dampak Kebijakan Dalam Pembangunan Waduk Jatigede*.
http://litbang.pu.go.id/pkpt/assets/files/Vol_7_No_3_2015.pdf. diakses pada tanggal 15 Oktober 2022
- Hutabarat, G. F. I., 2022. *KAJIAN GREEN POLITIC THEORY DALAM UPAYA MENANGANI DEFORESTASI PAPUA TERKAIT AKTIVITAS EKSPANSI*. Jurnal Polinier Vol. 7, No. 2. Doi : <https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5488> diakses pada tanggal 5 November 2022
- Melfianora. __. *PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH DENGAN STUDI LITERATUR*.
<https://www.google.com/url?sa=t&ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip596ri5v7AhW20HMBHSabCN8QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Fefmc2%2F&usg=AOvVaw0xY3ZR0QcbYK3Jcqx256J8> diakses pada tanggal 5 November 2022
- Mustika, W. & Asyiwati, Y. 2017. *KAJIAN IDENTIFIKASI DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DARI PRODUKSI PADI DI KAWASAN WADUK JATIGEDE*. Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 3, No.1 Doi : <http://dx.doi.org/10.29313/pwk.v0i0.6070> diakses pada tanggal 6 November 2022
- Nurjaman, N. __. *Bendungan Raksasa Dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat*.
<https://www.dw.com/id/bendungan-raksasa-dan-perampasan-ruang-hidup-rakyat/a-18684241>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
- Rachmawan, D. 2016. *Konflik Sosial (Kasus Pada Pembangunan Bendungan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat)*.
<http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/4618/pdf>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2022
- Satria, A. __. *Ekologi Politik*.
<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/76147/1/BUK2007d.pdf> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.
- Shiva, V. 2001. *Water Wars: Privatization, Pollution and Profit*.
<http://web.boun.edu.tr/ali> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022
- Suwartapradja, O. 2012. *Konflik Sosial (Kasus Pada Pembangunan Bendungan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat)*.
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/pustaka_unpad_konflik_sosial.pdf. diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

